



INDONESIA SIPF

E - NEWSLETTER

Edisi 1 Tahun 2015 ●

INDEKS

- Pasar Keuangan Rakyat Indonesia 2014
- Risk And Governance Indonesia SIPF
- Perjalanan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) 2014
- Lintas Peristiwa

PASAR KEUANGAN RAKYAT INDONESIA 2014



Pasar Keuangan Rakyat (PKR) 2014 merupakan acara yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam sektor keuangan sehingga diharapkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi jauh lebih meningkat.

Acara ini diadakan di dua tempat yang berbeda, yaitu di Jakarta dan di Indramayu. Di Indramayu, acara diadakan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Nelayan Karangsong, pada tanggal 18 Desember 2014. Acara yang bertemakan "Layanan Jasa Keuangan untuk Masyarakat" ini, dihadiri oleh masyarakat yang berasal dari kalangan nelayan, petani, UMKM (pengrajin batik), dan ibu rumah tangga. Acara ini diramaikan oleh beraneka ragam kegiatan yang salah satunya ialah peluncuran layanan keuangan mikro oleh OJK, seperti tabungan tanpa biaya administrasi, asuransi mikro yang nilai preminya di bawah Rp50.000, reksa dana mikro yang nilai awal investasinya ialah Rp 100.000, dan lain sebagainya. Dengan adanya acara ini, tingkat literasi masyarakat golongan menengah ke bawah terhadap produk dan jasa keuangan diharapkan menjadi lebih meningkat. Selain itu, golongan masyarakat tersebut diharapkan dapat lebih mudah mengakses produk dan jasa keuangan yang selama ini menjadi hal yang asing bagi mereka.

[Bersambung ke halaman 2]

DARI REDAKSI

Dalam semangat kami untuk memberikan perlindungan kepada investor efek Indonesia, kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pemangku kepentingan mengenai manfaat dari keberadaan kami di industri pasar modal Indonesia. Sejalan dengan semangat kami tersebut, partisipasi kami dalam acara Pasar Keuangan Rakyat 2014, merupakan rangkaian dari upaya kami dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang akan diberitakan secara khusus dalam edisi E-Newsletter kali ini.

Selain itu, salah satu faktor penting dalam mengelola risiko, ialah Risk Governance. Dengan adanya Risk Governance, manajemen di sebuah perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dengan tetap mempertimbangkan risiko serta kepatuhan yang terdapat di dalam perusahaan yang ada. E-Newsletter ini juga akan meliputi pertumbuhan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) selama tahun 2014, berikut dengan prospeknya di tahun 2015 ini.

Selamat Membaca,

Redaksi



Redaksi

Penerbit: P3IEI
Penasihat: Direksi P3IEI
Penanggung Jawab: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan
Tim Redaksi: Charya Rabindra Lukman, Mariska Arityany Azis, Ririh Asih Priyahita, Irrevaldy, Wahyudi Saptono, Raihan Fuadi, Ahmad Amiruddin

Alamat Redaksi:

Menara Global 19th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950
Phone +62 21 - 527 0206 | Fax +62 21 - 527 0207
E-mail: helpdesk@indonesiasipf.co.id
www.indonesiasipf.co.id
Sirkulasi: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan

Selain peluncuran layanan keuangan mikro, OJK juga menggelar miniatur pasar keuangan rakyat yang direalisasikan dengan pendirian booth-booth yang diisi oleh sektor pasar modal, perbankan, asuransi, pegadaian, pembiayaan, dan dana pensiun.

Adapun PKR yang berlokasi di Jakarta, diadakan di Jakarta International EXPO Kemayoran, pada tanggal 20 dan 21 Desember 2014. Acara yang dihadiri oleh masyarakat yang berasal dari wilayah Jabodetabek ini, diisi dengan variasi aktivitas-aktivitas yang menarik. Contohnya ialah seminar keuangan mengenai kewirausahaan, konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, pameran produk keuangan terkini, lomba Cerdas Keuangan, konser musik yang dibawakan oleh musisi-musisi papan atas Indonesia, dan lain sebagainya. Maksud dari adanya kegiatan-kegiatan tersebut adalah supaya masyarakat sekitar wilayah Jabodetabek yang sebagiannya merupakan golongan menengah ke atas dapat lebih memahami dan memanfaatkan secara potensi sektor keuangan Indonesia dengan lebih maksimal dengan cara terjun langsung menjadi investor efek sebagai contohnya.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Bapak Muliaman Darmansyah Hadad pada hari pertama tersebut, dipenuhi oleh *booth-booth* dari sektor-sektor keuangan yang terdiri dari pasar modal, perbankan, asuransi, pegadaian, pembiayaan, dan dana pensiun. Selain itu, Bank Indonesia, OJK, LPS dan *Self-Regulatory Organization* (SRO) yang terdiri Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), juga turut meramaikan acara tersebut.



Pembukaan Pasar Keuangan Rakyat oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani

Antusiasme Para Pengunjung Pasar Keuangan Rakyat di Booth Indonesia SIPF untuk mengetahui lebih jauh mengenai DPP dan PDPP

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), mendapat kesempatan untuk ikut meramaikan acara tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat P3IEI untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan dalam melakukan investasi efek di pasar modal Indonesia. Dengan hadirnya P3IEI pada acara ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih tertarik dan khususnya merasa aman dalam berperan aktif di pasar modal Indonesia sebagai investor efek, demi terciptanya pasar modal yang aman, teratur, wajar, dan efisien secara berkelanjutan.

Untuk acara yang berlokasi di Indramayu, direktur utama P3IEI, Bapak Yoyok Isharsaya, mewakili P3IEI dengan menghadiri acara tersebut. Adapun untuk acara yang berlokasi di Jakarta, P3IEI mengisi salah satu *booth* yang tersedia. Pengunjung *booth* P3IEI berasal dari kalangan ibu rumah tangga, mahasiswa, dan karyawan swasta. Setelah dijelaskan mengenai konsep perlindungan investor efek yang diberikan oleh P3IEI, para pengunjung sangat antusias dan mendukung adanya konsep perlindungan tersebut. Selain itu, P3IEI juga mengadakan survei mengenai pengetahuan masyarakat terhadap eksistensi P3IEI. Hasilnya ialah para responden menganggap bahwa investor di pasar modal Indonesia memang perlu mendapat perlindungan dari P3IEI, dan mereka mendukung penuh keberadaan P3IEI di pasar modal Indonesia.

[Ahmad Amiruddin]

RISK AND GOVERNANCE INDONESIA SIPF

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *Risk Governance* yang dapat diterapkan sesuai dengan budaya dan tradisi di masing-masing negara. Secara garis besar prinsip tersebut adalah *Equitable Treatment, Accountability, Responsibility, Independency, Transparency*.

Penerapannya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 di dalam Pasal 92 jo Pasal 97 bagi Direksi dan Pasal 114 bagi Dewan Komisaris mengatur bahwa Direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ayat (2) mengatur bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai Ayat (1) dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT / Anggaran Dasar. Sedangkan Pasal 97 menyatakan Direksi diharuskan menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Menjalankan perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kebijakan yang dipandang tepat merupakan wujud penerapan dari prinsip Risk Governance yang baik, kaidah tersebut merupakan perwujudan dari *fiduciary duty, duty of care, duty of loyalty* dari tugas pengurusan direksi. Prinsip tersebut juga berlaku pada Dewan Komisaris pada Pasal 114 sebagaimana halnya berlaku pada Direksi.



Sumber Gambar: <http://mastship.com/>

Secara Teoritis, batasan pengertian itikad baik dan penuh tanggung jawab yang wajib diemban dalam tugas kepengurusan tersebut oleh organ PT memang belum didefinisikan secara jelas. Namun kita dapat menggunakan penerapan Prinsip *Risk Governance* sebagai acuan dalam menilai apakah kedua organ tersebut telah beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam arti luas penerapan *Risk Governance* tidak hanya melibatkan Organ Perseroan namun dapat pula melibatkan stakeholder lainnya diluar organ utama PT. Contohnya orientasi pengurus tidak hanya melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk pemegang saham perusahaan namun lebih luas lagi dengan harus memperhatikan kepentingan Pemerintah, Karyawan, Masyarakat serta *stakeholder* lainnya yang berhubungan dengan perseroan.

Terdapat keterkaitan yang erat antara *Risk Governance* dengan *Corporate Management* dengan adanya komitmen bersama yang disepakati

antara organ utama PT meliputi visi, misi serta tujuan perusahaan yang ditetapkan oleh direksi dengan menciptakan budaya dan etika korporasi yang mendukung tercapainya tujuan korporasi tersebut.

Hukum merupakan sistem yang saling berkaitan satu dengan lainnya, sama halnya dengan Organ perseroan yang terdiri dari bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perseroan tersebut sesuai dengan peraturan dan asas-asas yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi. Penerapan dan pemahaman *Risk Governance* sebagai pedoman pada gilirannya akan memberikan dampak dalam meningkatkan kepercayaan investor pasar modal sebagai salah satu *stakeholder* perseroan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

[Charya Rabindra Lukman]



HAPPY NEW YEAR 2015
WISH YOU A PROSPEROUS
AND LUCKY YEAR

PERJALANAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)

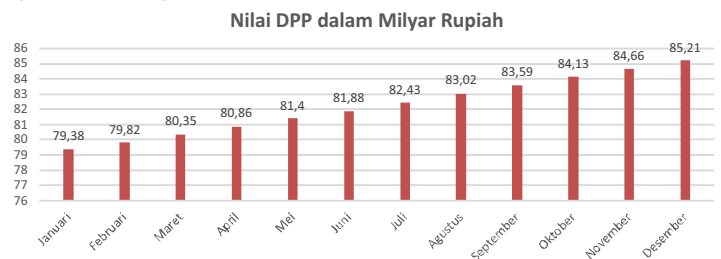
Sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), P3IEI mulai membentuk DPP pada bulan Juni 2013 dengan menghimpun dana dari sumber kontribusi awal yang dibayarkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian masing-masing sebesar Rp15 miliar, sehingga nilai DPP yang terbentuk per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp45 miliar. DPP yang terbentuk tersebut kemudian dikelola oleh P3IEI dengan diinvestasikan pada instrumen deposito bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Sampai dengan 31 Desember 2013 hasil investasi DPP adalah sebesar Rp1,35 miliar. Sehingga per 31 Desember 2013 nilai DPP adalah sebesar Rp46,35 miliar.

Kemudian, pada bulan Januari 2014, P3IEI kembali menghimpun dana guna pembentukan DPP dari sumber-sumber sebagai berikut:

- Kontribusi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian masing-masing sebesar Rp5 miliar, sehingga total kontribusi ketiganya adalah sebesar Rp15 miliar.
- Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100 juta untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, sehingga didapatkan iuran keanggotaan awal sebesar Rp10,7 miliar.
- Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah yaitu sebesar Rp7,075 miliar.

Sehingga pada 31 Januari 2014 nilai DPP yang terbentuk adalah sebesar Rp79,38 miliar.

P3IEI terus melakukan pengembangan terhadap DPP melalui kegiatan investasi. Nilai DPP dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp79.384.948.873,- (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) pada tanggal 31 Januari 2014, menjadi Rp85.213.342.757,- (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 31 Desember 2014, dengan pertumbuhan sebesar 0,6% (nol koma enam per seratus) per bulan.



Adapun pada bulan Januari 2015, DPP akan mendapatkan tambahan pendanaan dari Annual Membership Fee sekitar Rp7 miliar yang akan dibayarkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Selain itu, hasil pengembangan DPP oleh P3IEI selama tahun 2015 diperkirakan adalah sebesar Rp4 miliar. Berdasarkan proyeksi tersebut di atas, maka total nilai DPP pada akhir tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp96 miliar. Dengan terus meningkatnya nilai DPP tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan coverage DPP sebagai bentuk perlindungan kepada investor di pasar modal Indonesia.

[Wahyudi Saptono]

LINTAS PERISTIWA



5 November 2014 - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2015



7 November 2014 - Sharing Session dengan Bapak Indra Safitri, Senior of Counsel Melli Darsa & Co.



17 November 2014 - Kunjungan dari Tim Manajemen Risiko KPEI untuk Memahami Proses Bisnis P3IEI